

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa di antaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan kedua indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat

pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Menurut *Human Development Report 2007- 2008*, IPM Indonesia sebesar 0,728 pada tahun 2007 dan berada pada peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei oleh UNDP. Indeks GDP Indonesia berdasarkan *Purchasing Power Parity (PPP)* mencapai 0,609 dengan nominalnya sebesar US\$ 3.843. Semakin baik angka *PPP* mendekati 1 maka kemampuan daya beli masyarakat semakin baik dan begitu pula sebaliknya. Angka harapan hidup orang Indonesia mencapai 69,7 tahun, atau dinyatakan dalam indeks harapan hidup mencapai 0,745. Indeks pendidikan mencapai 0,83 dengan angka melek huruf sebesar 90,4% dan rata-rata rasio masuk sekolah dari SD sampai SMU mencapai 68,2%.

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Menurut Kameo dalam Victory News menyatakan bahwa Menelisik data IPM NTT, terlihat bahwa ada perbaikan setiap tahun, dari 59,21 pada tahun 2010

menjadi 63,73 pada tahun 2017 atau rata-rata meningkat 0,565 poin per tahun, sedikit di atas rata-rata peningkatan IPM nasional sebesar 0,535 per tahun. Namun demikian, jika tren perubahan IPM masih sama seperti tren 2010-2017, maka NTT akan membutuhkan waktu lebih dari 13 tahun untuk sampai pada level rata-rata IPM Indonesia saat ini. Sebenarnya, dari tiga dimensi pembangunan yang digunakan untuk menghitung IPM, NTT cukup baik dalam dimensi pendidikan. Rata-rata harapan lama sekolah di NTT mencapai 13,07 tahun sedangkan rata-rata nasional hanya 12,85.

Namun, dalam dimensi kesehatan NTT masih tertinggal. Rata-rata angka harapan hidup saat lahir 66,07 tahun sedangkan rata-rata nasional sudah mencapai 71,06. Selain masalah masih rendahnya IPM, ketimpangan pembangunan antar daerah juga masih menjadi tantangan. Secara nasional, terdapat 148 kabupaten/kota dengan IPM lebih tinggi dari rata-rata nasional (70,81). Dari jumlah tersebut, 97 (65 persen) adalah kota dan 51 (34,5 persen) kabupaten. Sedangkan daerah dengan IPM diatas 80,0 (very high HDI) semuanya adalah daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kesenjangan dalam kemajuan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia.

Kesenjangan ini juga terlihat cukup menyolok untuk NTT dimana IPM Kota Kupang telah mencapai 78,25 (high HDI) dan menempati urutan ke-40 tertinggi dari 408 kabupaten/kota, sedangkan IPM dari 21 kabupaten lainnya di NTT berada cukup jauh di bawahnya. IPM Ngada yang berada pada urutan kedua hanya 66,47 atau 12,3 poin di bawah Kota Kupang. Bahkan terdapat lima kabupaten dengan IPM di bawah 6,00 yaitu Alor, Sumba Tengah, Malaka,

Manggarai Timur dan Sabu Raijua dengan perberbedaan 18,64 – 23,05 poin dari Kota Kupang.

Tabel 1.1
Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2017 (persen)

No	Wilayah	Persentase Penduduk Miskin				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sumba Barat	29.35	27.79	30.56	29.34	29.28
2	Sumba Timur	30.08	27.63	31.74	31.43	31.03
3	Kupang	19.96	19.05	23.37	23.43	22.91
4	Timor Tengah Selatan	27.3	26.79	31.12	29.89	29.44
5	Timor Tengah Utara	21.37	20.89	25.2	24.07	23.52
6	Belu	14.42	14.24	16.81	15.82	15.95
7	Alor	19.88	19.48	22.92	22.35	21.67
8	Lembata	24.56	22.32	27.13	26.26	26.48
9	Flores Timur	9.06	7.83	9.66	10.31	10.75
10	Sikka	12.72	12.27	14.28	14.33	14.2
11	Ende	20.53	20.37	23.49	23.89	23.95
12	Ngada	11.25	10.76	12.81	12.69	12.77
13	Manggarai	21.33	20.22	23.18	22.5	21.91
14	Rote Ndao	28.86	26.85	30.49	29.6	28.81
15	Manggarai Barat	18.74	17.2	20.12	19.35	18.86
16	Sumba Tengah	31.82	31.4	36.22	36.55	36.01
17	Sumba Barat Daya	27.47	25.78	30.01	30.63	30.13
18	Nagekeo	12.08	12.02	14.38	13.61	13.48
19	Manggarai Timur	24.38	24.01	28.64	27.71	26.8

20	Sabu Raijua	32.37	29.48	33.17	32.44	31.07
21	Malaka	-	-	17.28	16.66	16.52
22	Kota Kupang	9.33	8.7	10.21	9.97	9.81
23	Nusa Tenggara Timur	20.41	19.6	22.61	22.19	21.85

Sumber: Provinsi NTT Dalam Angka, 2019

Pada tabel 1.1 Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat Presentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun terakhir Rata rata mengalami Fluktuasi baik daerah kota maupun daerah Kabupaten. Presentase penduduk miskin Paling banyak pada periode 2013 yaitu pada Kabupaten Sabu Raijua yakni sebesar 32,37%, dan Presentase terendah ada pada Kota Kupang dengan angka 9,33%. Pada Tahun berikutnya yaitu 2014 Presentase Penduduk Miskin tertinggi berada pada Kabupaten Sumba Tengah dengan angka 31,40% dan Presentase Penduduk Miskin terendah ada pada Kota Kupang yang menurun dari tahun sebelumnya menjadi 8,70%. Pada tahun 2015 sampai 2017 Presentase Penduduk Miskin Tertinggi ada pada Kabupaten Sumba Tengah dengan angka berturut turut 36,22%, 36,55%, dan 36,01%, dengan angka Presentase Penduduk Miskin Terendah pada Kota Kupang dengan angka berturut turut 10,21%, 9,33 % dan 9,8 %.

Berdasarkan Tabel diatas Persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun terakhir Rata rata mengalami Fluktuasi baik daerah kota maupun daerah Kabupaten. Presentase penduduk miskin Paling banyak pada periode 2013 yaitu pada Kabupaten Sabu Raijua yakni sebesar 32,37%, dan Presentase terendah ada pada Kota Kupang dengan angka 9,33%. Pada Tahun berikutnya yaitu 2014 Presentase Penduduk Miskin tertinggi berada pada

Kabupaten Sumba Tengah dengan angka 31,40% dan Presentase Penduduk Miskin terendah ada pada Kota Kupang yang menurun dari tahun sebelumnya menjadi 8,70%. Pada tahun 2015 sampai 2017 Presentase Penduduk Miskin Tertinggi ada pada Kabupaten Sumba Tengah dengan angka berturut turut 36,22%, 36,55%, dan 36,01%, dengan angka Presentase Penduduk Miskin Terendah pada Kota Kupang dengan angka berturut-turut 10,21%, 9,33 % dan 9,8 % .

Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diupayakan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat, dimana pertumbuhan produktivitas tersebut merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pada hakekatnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi maka akan terhindar dari kemiskinan. (Mulyadi, 2003) .

Perkembangan penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun berfluktuatif sehingga diperlukan beberapa program guna meminimalisasi tingkat fluktuasinya dan dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks

yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan - pilihan yang dimiliki oleh manusia (*Human Development Report, 1990*). Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pengukuran indeks pembangunan manusia memiliki manfaat sebagai instrumen kebijakan fiskal dan juga sebagai ukuran kinerja pemerintah daerah.

Hal tersebut menjadikan *gap* pembangunan manusia di antara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik. Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah

diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Melihat fenomena di atas, pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan karena kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 – 2017?
2. Apakah Kemiskinan , Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap indeks pembagunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahune 2013-2017?

3. Apakah Kemiskinan , Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran umum Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi secara parsial dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi secara simultan dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi para peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

2. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi mengenai belanja pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia.